

KETIDAKADILAN SOSIAL EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM RELOKASI TEMPAT USAHA DI KABUPATEN GOWA

Ansurlawarlin¹, Iskandar², Andi Burchanuddin³, Harifuddin⁴, Muh Ikhwan⁵

Universitas Bosowa^{1,2,3}

Universitas Muhammadiyah Maluku^{4,5}

Email: ansurlawarlin@universitasbosowa.ac.id¹, iskandar@universitasbosowa.ac.id², burchanuddin@universitasbosowa.ac.id³, harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id⁴, muhikhwanipm@gmail.com⁵

Abstrak

Salah satu penggerak perekonomian bangsa adalah Pedagang kaki lima atau PKL mempunyai peran besar terhadap perputaran perekonomian di bangsa ini. Menurunnya tingkat perekonomian pedagang kaki lima PKL maka akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi bangsa ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi sosial dan ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mendapatkan keadilan dari aspek lokasi penjualan yang strategis. Hal ini berangkat dari kondisi bagaimana para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di pinggir jalan yang selalu menjadi sorotan masyarakat selalu menimbulkan kemacetan yang hampir terjadi setiap hari.

Kata Kunci: PKL, Ekonomi, Sosial

Abstract

One of the drivers of the nation's economy is street vendors or street vendors who have a big role in the economic cycle in this nation. The decline in the level of the economy of street vendors and street vendors will have an impact on the economic development of this nation. This study uses the Literature Review Comparative Study procedure, using secondary information. The secondary information used is original scientific reports that are in posts or online dailies. The results of the study show that the social and economic conditions of the street vendors (PKL) are quite good. This departs from the condition of how street vendors (PKL) can survive selling even though they always cause traffic jams that occur almost every day.

Keywords: Street vendors, Economy, Social.

A. PENDAHULUAN

Covid-19 yang telah terjadi beberapa tahun terakhir ini menjadi menyebabkan kondisi ekonomi melemah. Hal ini telah menjadi penyebab masyarakat terbatas melaksanakan pergerakan, bekerja dan mencari nafkah. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab masyarakat

tidak bisa berinteraksi dengan sesama manusia, keterbatasan itu mengakibatkan roda perekonomian menjadi lumpuh total diakibatkan karena ada ketakutan untuk keluar rumah.

Pandemi covid-19 mengakibatkan para pedagang kaki lima (PKL) mengeluh karena penghasilan berkurang, bahkan yang terjadi beberapa pedagang ini terpaksa memberhentikan para pekerjanya untuk tidak bekerja karena tidak bisa membayar upah mereka, dampak lain sebagian pedagang dengan terpaksa harus gulung tikar karena modal mereka sudah habis. Hal ini menjadi bagian dari imbas dari adanya pandemic covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir yang menyebabkan pengangguran dimana-mana.

Salah satu penggerak perekonomian bangsa adalah Pedagang kaki lima atau PKL mempunyai peran besar terhadap perputaran perekonomian di bangsa ini. Menurunnya tingkat perekonomian pedagang kaki lima PKL maka akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi bangsa ini.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut pedagang yang berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan motor dengan gerobak yang diistilahkan dengan pagandeng sebagai bahasa umum dimasyarakat. Pedagang kaki lima (PKL) menjadi tempat utama produsen bagi kalangan kaum marginal (kelas bawah) sampai kepada kelas atas, hal ini menjadi pilihan karena barang yang diperjualbelikan relative murah dan bisa terjangkau karena letaknya strategis yang bisa dijumpai oleh masyarakat.

Pedagang kaki lima (PKL) ialah bagian dari jenis aktivitas pekerjaan yang termasuk kedalam kategori sektor informal, kita tahu bahwa sektor informal ini adalah sektor yang berlawanan dengan sektor formal. Pekerjaan sektor informal ini hampir semua jenis usahanya tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah atau bahkan ada sebagian dari pedagang yang menolak mendapatkan bantuan karena ketakutan setelah mendapat bantuan sudah tidak ada kebebasan untuk berjualan ditempat ini, walaupun dengan terpaksa para pedagang ini harus berjualan di pinggir jalan sebagai fasilitas pemerintah.

Disisi lain kita tahu komunitas pedagang sektor informal ini kebanyakan menggunakan fasilitas yang sederhana, misalnya motor mengangkut barang dagangan dengan menggunakan gerobak dan hampir semua pedagang kaki lima (PKL) berada pada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah yang mereka lakukan hanya berasaskan pengalaman turun temurun dari keluarga mereka.

Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) disisi lain sangat bermamfaat bagi konsumen, karena selain barang yang diperjual belikan yang dianggap murah, juga barangnya masih baru

dan pres dibandingkan barang yang dijual dipasar atau di toko, bagi konsumen barang yang dijual belikan oleh pedagang kaki lima (PKL) barangnya baru dipetik dan dipanen dikebun mereka sehingga masih baru. Bagi pemerintah adanya pedagang kaki lima (PKL) juga memberikan dampak positif karena dengan adanya pedagang kaki lima (PKL) setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Akan tetapi, walaupun ada dampak positifnya pemerintah juga terlibat langsung dalam hal penertiban dan penataan sehingga tidak mengganggu pengguna fasilitas jalan yang setiap hari lewat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus. Deskriptif yang dimaksud di sini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi ketidakadilan pemerintah dalam penanganan kaki lima di Panciro, kec. Bajeng, Kabupaten Gowa. Studi kasus tepat digunakan dalam penelitian ini agar bisa mengungkapkan gambaran fenomena dan kehidupan yang terjadi pada pedagang kaki lima (PKL).

Fenomonologis adalah jenis penelitian yang menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam yang lama dengan orang yang dimaksud, pengalaman dan kebiasaan seseorang dapat kita temukan melalui wawancara yang kita lakukan.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara Mendalam. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti baik dua orang atau lebih secara langsung dilapangan. Wawancara mendalam salah satu cara pengumpulan data atau informasi secara langsung dengan bertatap muka bersama informan, dengan tujuan dapat mendapatkan informasi atau gambaran dengan lengkap terkait topik yang akan diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Pedagang Kaki Lima

Kondisi sosial yang terjadi antar pedagang sudah pasti kita sering menjumpai perbedaan antar warga, baik yang terjadi antara keluarga juga terhadap masyarakat sekitar, dilingkungan masyarakat perbedaannya sangat mencolok salah satunya mencakup dalam aspek kehidupan, misalnya perbedaan antara kehidupan orang miskin dan orang kaya, si penguasa dan orang-

orang yang tidak berkuasa, orang kelas menengah dan orang kelas atas, pejabat dan masyarakat, orang dihormati dan orang tidak dihormati.

Perbedaan kondisi ini kadangkala di akibatkan oleh persoalan ekonomi dan kondisi sosial serta pembagian peran dalam aspek peranan yang ada sangkutannya dengan masyarakat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kondisi ialah dimana keadaan seseorang atau kedudukannya. Sedangkan sosial ialah persoalan yang ada kaitannya dengan masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di jalan tidak bisa terpisahkan dengan sejarah informal, dimana sektor informal adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa menghadirkan solusi terhadap kurangnya lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah. .

Lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah pada umumnya adalah lowongan yang dipersiapkan dan diperuntukkan oleh masyarakat yang memiliki pendidikan dan keahlian. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan keahlian khusus sudah pasti tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah sampai hari ini belum bisa menyiapkan pekerjaan yang cukup memadai untuk menampung masyarakat.

Pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Panciro Kec. Bajeng umumnya adalah warga pendatang dari desa tetangga untuk berjualan, mereka semua berdatangan antara pukul 01:00 WIT- 07:00 WIT dan kembali kerumah masing-masing setelah dagangan mereka habis terjual. Umumnya warga yang datang berjualan membawa barang dagangannya menggunakan motor yang dilengkapi dengan gandengan.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan, umumnya menggunakan tempat parkir atau berjualan dipinggir jalan yang harusnya digunakan untuk para pejalan kaki. Penggunaan bahu jalan untuk tempat para Pedagang Kaki Lima (PKL) mendirikan lapakpun mengakibatkan terganggunya lalu lintas di kawasan tersebut. Banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan motor atau menggelar, ada juga yang menggunakan mobil bak terbuka yang diparkir di bahu jalan yang sudah jelas bahwa bahu jalan tersebut tidak diperuntukkan untuk berjualan.

Hal ini bukan tanpa alasan, pendapat salah seorang Pelaku PKL, mengemukakan: "Saya berjualan di bahu jalan menggunakan mobil bak seperti ini bukan karena kemauan Saya, melainkan tidak ada lagi tempat yang strategis untuk Saya berjualan". Berdasarkan hal tersebut seharusnya pemerintah setempat dapat memberikan ruang yang layak untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebagian kecil Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar berjualan dibantu oleh Keluarganya dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki rasa kekhawatiran jika suatu saat nanti akan ada Satpol PP yang menertibkan. Hal ini sejalan dengan pendapat pelaku PKL yang lainnya, mengemukakan: "Tidak mungkin akan ada Satpol PP yang akan menertibkan kami para Pedagang Kaki Lima, karena jalan tersebut adalah jalan yang berdada di desa yang jauh dari perkotaan. Walaupun kehadiran kami para Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan kemacetan, itu adalah hal biasa dan wajar".

Meskipun posisi Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan ada yang dekat dengan kantor pemerintah, tapi hal itu bukan berarti pemerintah bersikap memperhatikan kemacetan yang hampir setiap hari kerja terjadi. Pemerintah setempat seolah-olah membiarkan kemacetan itu dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar.

Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi tentu para Pedagang Kaki Lima (PKL) harus direlokasi. Walaupun nantinya para Pedagang Kaki lima (PKL) direlokasi tentu akan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Hal ini karena jika dipindahkan ketempat yang lebih layak huni, apakah pengahsilan para Pedagang Kaki Lima akan tetap sama atau bahkan mengalami kenaikan atau sebaliknya. Tak ada yang bisa menjamin itu semua.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar berjualan atas kemauan sendiri dan menempati tempat yang tidak seharusnya dipergunakan untuk berjualanpun atas kemauan sendiri, asalkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) membayar uang keamanan pada Hansip/Penjaga Keamanan. Hal ini sejalan dengan pendapat pelaku PKL, mengemukakan: "Kami berjualan disini atas kemauan kami sendiri, asalkan nanti kami membayar uang kemanan sebesar Rp. 5.000-, pada hansip atau penjaga keamanan dan kami diwajibkan untuk menjaga kebersihan jika sudah berdagang".

Dalam hal ini memang antara pedagang dan penjaga kemanan saling diuntungkan, tetapi pada dasarnya hal ini tidaklah dibenarkan karena para Pedagang Kaki Lima berjualan di bahu jalan yang mengakibatkan hampir setiap hari kerja seperti hari Senin sampai hari jum'at menimbulkan kemacetan. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Panciro sering juga merasakan perasaan yang sama bahwa kemacetan yang timbul itu akibat para Pedagang Kaki Lima berjualan dibahu jalan.

Akan tetapi, para Pedagang Kaki Lima juga tidak secara sengaja ingin berjualan dibahu jalan, ini karena tempat yang sekarang dipakai berjualan membawa keuntungan. Karena pada saat para konsumen turun dari Angkot itu langsung bertemu dengan para PKL yang berdagang.

Para konsumen juga merasa lebih senang dengan adanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini karena barang yang dijual lebih murah dan lebih bagus. Para konsumen tidak perlu menuju Pasar Dalam untuk menemukan barang yang diinginkan, para konsumen tinggal membeli dagangan yang dijual oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kondisi Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat berada pada faktor kebutuhan sehari-hari, kondisi ekonomi tersebut adalah aspek produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran. Sedangkan pendekatan sosiologinya adalah jenis penelitian, pendekatan, metode dan pendekatan yang digunakan sosiologi dalam menjelaskan fenomena kondisi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi ekonomi dan sosiologis kadangkala tidak terjadi perbedaan pandangan dalam hal produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran sebagai bagian terpenting dalam kajian kehidupan masyarakat.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar berjualan mulai sejak pukul 00:00 WIT setiap malam sampai dengan pukul 07:00 WIT setiap harinya dan terkadang sampai jam 09:00 WIT apabila jualan belum habis. Menurut Dg. Rala salah satu pelaku PKL, Dg. Rala mulai meninggalkan rumahnya sejak pukul 01:00 WIT dengan membonceng jualannya menuju Panciro dan sekitarnya, jualan yang dibawa berupa sayuran yang menjadi bagian dari makanan pokok. Berangkat dengan harapan jualan bisa habis terjual sebelum pagi agar bisa secepatnya kembali kerumah untuk beristirahat.

Beda halnya dengan Dg. Rangka dengan berjualan beras dengan modal mulai Rp. 1.000.000. Dg. Rangka memulai usahanya dengan berjualan beras sejak tahun 2000an, menurutnya beliau melakoni pekerjaan berjualan selain tidak memiliki ijazah yang tinggi juga susahny mendapatkan lapangan pekerjaan. Kedua pelaku PKL ini memilih jalan untuk jualan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir jalan tujuan dapat menafkahi keluarganya, berangkat dengan harapan jualan bisa terjual dan hasil yang memuaskan.

Hal ini juga didasari pada pemilihan tempat berjualan, para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan diarea yang ramai. Para pedagang Kaki Lima juga sering kali berusaha agar bagaimana caranya produk yang dijual dapat terlihat oleh para konsumen. Oleh karena itu, mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis. Di samping faktor lokasi yang strategis dalam arti dekat dengan keramaian atau mudah dijangkau pembeli, PKL juga memperhitungkan faktor kedekatan. Ini membuktikan bahwa ada variasi pemusatan ruang dalam

PKL yang disebabkan oleh hubungan yang kompleks antara suplai pekerja, keperluan produksi, perilaku pemasaran, dan sarana serta prasarana transportasi. Perlunya lokasi produksi dan pemasaran dekat dengan sumber bahan baku telah mendorong munculnya pemusatan sektor informal PKL.

Peran Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

Peran Pemerintah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di pinggir jalan, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi pemerintahan terkait dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan beberapa indikator antara lain:

1. Penataan tempat usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di jalan bertujuan agar pedagang kaki lima tidak menempati lokasi yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota. Penataan yang dilakukan dengan memberikan tempat usaha bagi pedagang kaki lima berupa kios-kios yang telah ditata berdasarkan jenis jualan pedagang. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditujukan untuk formalisasi actor informal, artinya dengan ditematkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Pemda Gowa dapat menarik redistribusi dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pembinaan, Pemerintah Daerah dan instansi pemerintahan terkait memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Serta untuk meningkatkan kemampuan pedagang sehingga mereka dapat menopang ekonomi yang lebih maju dan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. pembangunan tempat usaha dimaksudkan oleh pemerintah untuk tetap memberikan kesempatan kepada para pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga berusaha menghilangkan tanggapan para pedagang kaki lima yang selama ini menganggap diri mereka sebagai pihak yang selalu ditelantarkan selama proses penataan pedagang kaki lima. Dengan adanya pembangunan tempat usaha yang baru bagi mereka,

- maka Pemerintah menginginkan para pedagang kaki lima menempati lokasi yang telah ditentukan dan tidak lagi mempergunakan lokasi-lokasi yang melanggar peraturan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten masih belum maksimal. Karena melihat banyaknya pedagang kaki lima yang masih menempati lokasi yang dilarang sebagai tempat usaha, seperti jalan raya poros. Penataan pedagang kaki lima di jalan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam menciptakan situasi tetap kondusif bagi semua pihak dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang yang melanggar sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.
 4. kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di jalan yakni minimnya partisipasi masyarakat tentang peraturan yang dibuat pemerintah sehingga terkadang sikap acuh tak acuh diperlihatkan oleh masyarakat dan tindakan melawan aparat yang dilakukan oleh para pedagang tak dapat dihindarkan. Partisipasi masyarakat masih minim tentang peraturan tentang penataan pedagang kaki lima sehingga dalam penerapannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami ketidakadilan untuk berjualan. Hal ini berangkat dari kondisi bagaimana para Pedagang Kaki Lima (PKL) terpaksa bertahan untuk berjualan meskipun selalu menimbulkan kemacetan yang hampir setiap hari Senin terjadi. Pun sama halnya dengan kondisi ekonomi Para Pedagang Kaki Lima yang cukup baik dan bahkan memberi keuntungan untuk Pedagang Kaki Lima, ini disebabkan lokasi berjualan sangat dekat dengan konsumen dan produk yang dijual pun lebih bagus dan murah dari pada pedagang yang berjualan di toko.

Saran

Diharapkan para akademisi terkhusus akademisi sosiologi Perkotaan dapat memberikan solusi yang baik untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak lagi berjualan di bahu jalan, sehingga tidak dapat menimbulkan kemacetan yang terus saja terjadi. Solusi yang diharapkan

adalah solusi yang membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga diuntungkan. Pemerintah harusnya jangan berdiam diri atau bahkan seolah-olah membiarkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati bahu jalan yang harusnya dipergunakan untuk arus lalu lintas kendaraan. Pemerintah juga harus dapat merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Pasar Senin agar tidak ada lagi kemacetan yang terjadi setiap hari Senin. Tetapi jangan sampai Tindakan pemerintah untuk merelokasi ini menjadi dampak buruk untuk para Pedagang Kaki Lima. Pemerintah harus dengan serius memikirkan bagaimana agar para Pedagang Kaki Lima dapat pindah dan juga memperoleh keuntungan. Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Senin harusnya jangan menggunakan bahu jalan untuk berjualan karena menimbulkan kemacetan. Diharapkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Senin berjualan ditempat yang layak, tapi tetap dapat memperoleh keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haki, U., & Komarudin, M. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang. *Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 245-255.
- Yunus, A. I. (2011). Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Kasus Penjual Pisang Epe'di Pantai Losari). Skripsi Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mujaddidi, A. S. (2022). Relokasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Pedagang Kaki Lima Di Arek Lancor Pamekasan). *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(02), 127-136.
- Novianto, W. (2021). Analisis Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1-9.
- Fidela, S. (2021). Analisis Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Studi Fenomenologi di Pasar Sukaramai Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Maulida, F., Zamzami, Z., & Yulmardi, Y. (2021). Analisis kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal (studi kasus pedagang laki lima yang berada dilingkungan jembatan

- Gentala Arasy Kota Jambi). e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 10(1), 7-24.
- Prasetya, A., & Komara, B. D. (2019). Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 2(2), 1-7.
- Riski, M., Jumadi, J., & Amirullah, A. Dinamika Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Losari 2000-2019. *Attoriolong*, 19(1), 125-133.
- Hariyani, T. (2021). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekuivalensi*, 7(1), 147-164.
- Hardiansyah, A., Rahmadi, S. R., & Parmadi, P. (2020). Analisis karakteristik sosial dan ekonomi usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi (studi kasus pedagang nasi goreng). e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 9(3), 141-154.